

Pendampingan Dan Penguatan Kelembagaan Bumdes “Astaguna” Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19

Juhari Sasmito Aji¹, Dian Retnaningdiah², Kemala Hayati³

Keywords :*Pendampingan**Penguatan**Kelembagaan**BUMDes**Pasca Pandemi***Correspondensi Author**

Ilmu Pemerintahan, Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Email: juhariummy@gmail.com**History Article***Received:* 22-04-2022;*Reviewed:* 28-05-2022;*Revised:* 24-06-2022;*Accepted:* 28-07-2022;*Published:* 19-08-2022;

Abstrak. Tujuan PKM adalah untuk mencapai perbaikan kelembagaan yang diawali dari pembaharuan literasi sumberdaya manusia. Solusi yang ingin dicapai yakni menerapkan kesiapan kualitas sumberdaya manusia yang optimal dan cakap terkait pengetahuan kelembagaan melalui upaya perbaikan tugas pokok fungsi yang jelas dan terwujudnya koordinasi kerja internal badan yang kondusif. Mengupayakan manajemen unit usaha dengan analisis potensi dan asset desa disertai pelibatan masyarakat dan mengembangkan jaringan kerjasama multi pihak. Penerapan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung efisiensi kegiatan administrasi dan pemasaran. Proses pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai sarana penanganan solutif. Proses pengabdian dilakukan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang melibatkan pihak mitra sebagai subjek dan objek pengabdian guna meningkatkan partisipasi serta keberhasilan pengabdian. Partisipasi tersebut diwujudkan dari peran mitra dalam menentukan masalah BUMDes yang membutuhkan peran pengabdian, antusiasme penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemasaran dan bidang administrasi, diskusi evaluasi pengabdian guna menentukan ukuran keberhasilan.

Abstract. The goal of PKM is to achieve institutional improvements that begin with the renewal of human resource literacy. The solution to be achieved is to implement optimal and capable human resource quality readiness related to institutional tightening through efforts to improve the main tasks of clear functions and the realization of conducive coordination of internal work of the body. Strive for business unit management with analysis of village potential and assets accompanied by community involvement and developing a multi-party cooperation network. Application of communication information technology to support the efficiency of administrative and marketing activities. The process of implementing devotion activities as a means of handling solutions. The service process is carried out through the planning stage, implementation stage, and evaluation stage involving the partner party as the subject and object of service to increase participation and success of the service. The participation is realized from the partner's role in determining the bumdes problem that requires the role of service, enthusiasm for the application of information and communication technology in the field of marketing and administration, and discussion of devotion evaluation to determine the measure of success.

PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi desa telah membawa pengaruh terhadap konsepsi desa. Pemerintah desa memiliki kebebasan otoritas untuk merencanakan program pembangunan dan mengurus serta mengatur kepentingan sesuai kebutuhan masyarakat desa tanpa intervensi dari pemerintah daerah (Letty, 2016). Keberadaan desa menjadi agen terdepan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat menjangkau sasaran yang hendak disejahterakan (Aji, 2021). Hal tersebut menjadikan desa dinilai strategis untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, selaras dengan program Nawacita dalam salah satu butir yang berbunyi “*membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*” adanya Nawacita menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap keberadaan desa yang telah mengusahakan penguatan wilayah terendah, yaitu desa untuk berkompetisi secara global. Pembangunan tersebut secara spesifik adalah pembangunan ekonomi yang paling krusial dan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. BPS telah menyatakan bahwa kemiskinan mencapai 26,50 juta jiwa pada September 2021 dengan dominasi penduduk desa.

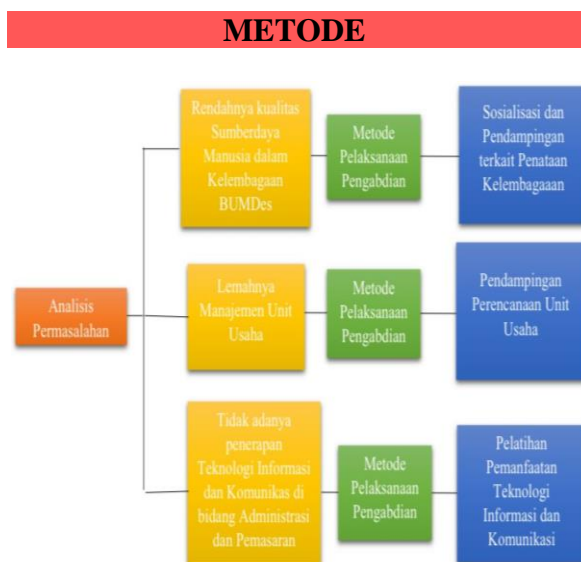
Permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan menuntut desa untuk mencapai tindakan solutif dengan menciptakan inovasi yakni dengan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Suleman et al., 2020; Nugroho, 2015; Agung, 2021; Amira, 2021). Adanya BUMDes tersebut sebagai aktivitas yang berorientasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat (Nursetiawan, 2018; Caya, 2019; Nurhayati, 2018). Sehingga, BUMDes menjadi lembaga berbadan hukum yang melaksanakan pengembangan ekonomi. Dalam hal ini, BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang memberi wadah masyarakat desa dalam rangka mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik (Febryani, 2019; Fitriksa, 2017). BUMDes memiliki payung hukum dari sisi legal formalnya (UU Nomor 6 Tahun 2014) sebagai dasar pembentukan dan pengelolaan dalam mencapai keberhasilan yakni meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan peningkatan perekonomian masyarakat desa (Hilman, 2019). Senada dengan Hilman, upaya dalam mencapai keberhasilan BUMDes tersebut diperlukan penyesuaian potensi desa, potensi

masyarakat setempat, dan aset desa sehingga tidak hanya menduplikasi program kerja desa lain (Ihsan, 2018). Keberadaan BUMDes sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi dan sosial yang membawa pada perubahan ekonomi antar masyarakat dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Kusuma., 2014).

Kini BUMDes telah terbentuk dan tersebar di berbagai desa. Akan tetapi, tidak semua BUMDes yang telah terbentuk mempunyai perkembangan yang bagus. Banyak diantaranya yang masih membutuhkan pendampingan agar mampu menampung aktivitas ekonomi yang berkembang di desa. Khususnya kelembagaan yang menjadi latar belakang keberhasilan BUMDes salah satunya dipengaruhi dengan kelembagaan yang baik. Berdasarkan temuan awal BUMDes yang menjadi objek pengabdian masih dalam kategori rintisan sesuai dengan umur BUMDes yang masih relatif muda. Sehingga tidak memberikan dampak peningkatan ekonomi BUMDes secara signifikan. Realitas kelembagaan masih jauh dari ideal, secara komprehensif kelembagaan BUMDes Astaguna belum mencapai penataan secara optimal. Dalam hal ini, Kelembagaan merupakan aturan dalam suatu organisasi untuk membantu anggotanya dalam berinteraksi satu dengan yang lain dalam rangka mencapai tujuan bersama (Putri S, 2019).

Permasalahan BUMDes Astaguna ditunjukkan dengan tidak adanya implementasi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan struktur hierarki termasuk belum mempunyai aturan main yang mengatur secara jelas pembagian tugas pokok fungsi serta hubungan antar pengurus untuk menjalankan fungsi organisasi atau lembaga, Padahal landasan terbentuknya suatu kelembagaan selayaknya dijalankan dengan fungsi manajemen yakni *planning, organizing, actuating, dan controlling* (Wirdani, 2021). Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes juga memengaruhi kualitas kelembagaan. Bertepatan dengan mewarnainya Covid-19 dan kebijakan pemerintah yang membatasi interaksi sosial telah memengaruhi perkembangan BUMDes Astaguna, khususnya kendala bidang pemasaran pada unit usaha, hal ini berkorelasi dengan temuan awal bahwa BUMDes Astaguna belum memiliki jangkauan pasar yang luas. Sistem pemasaran yang diterapkan oleh BUMDes masih bersifat konvensional dengan penjualan di pasar tradisional.

Tidak adanya perencanaan yang baku untuk program dan kegiatan BUMDes, disebabkan rendahnya literasi pengurus BUMDes mengenai kelembagaan BUMDes yang ideal. Hal demikian menyebabkan BUMDes menjadi stagnan. Padahal, Desa Trihanggo memiliki potensi untuk mendirikan unit usaha pemasaran, di dukung dengan lokasi semi perkotaan yang strategis sehingga memberi kemudahan pemasaran. Oleh karenanya, tim pengabdian mengawal dan memfasilitasi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan BUMDes dengan pelatihan yang diberikan di antaranya mencakup aspek perbaikan struktur kelembagaan beserta penekanan tugas dan kewenangannya, perencanaan program, memang diperlukan kemampuan perencanaan program dan kegiatan yang bagus yang bisa melihat potensi-potensi yang ada di pedesaan. Kemudian pelatihan untuk menerapkan teknologi informasi untuk bidang administrasi dan pemasaran guna menunjang perkembangan operasional BUMDes. Dalam hal ini, kegiatan pengabdian BUMDes Astaguna perlu diperbaharui guna memberikan peluang BUMDes untuk lebih maju dan mandiri, sehingga dapat mencapai meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan mengurangi populasi kemiskinan di Indonesia.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

Tahap awal pengabdian masyarakat memilih kelompok sasaran BUMDes Ataguna Desa Trihanggo yang menjadi salah satu lembaga sebagai penggerak ekonomi desa guna kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Pengabdian diawali dengan koordinasi kepada

kelompok sasaran melalui identifikasi masalah dan kebutuhan mitra dalam bentuk observasi dan wawancara untuk mendapatkan data awal. Setelahnya, melakukan koordinasi kesediaan mitra untuk menjadi kelompok sasaran pengabdian dan menyusun agenda jadwal pengabdian sesuai kesepakatan bersama, guna menentukan waktu yang sesuai antara kedua belah pihak. Penentuan jadwal tersebut sangat penting karena memengaruhi tingkat partisipasi pengurus BUMDes sebagai kelompok sasaran pengabdian. Pada tahap awal pengabdian, juga diperlukan penyusunan dokumen usulan pengabdian kepada Lembaga, Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk ditinjau dan mendapatkan persetujuan pengabdian agar dapat menentukan luaran dan kebutuhan rencana anggaran.

Tahap pelaksanaan pengabdian masyarakat diawali dengan pembentukan panitia pengabdian dan sarana prasarana yang dibutuhkan. Untuk mengukur tingkat pemahaman pengurus BUMDes terkait pentingnya kelembagaan maka terdapat sesi pengisian pre-test. Kemudian, dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan terkait penataan kelembagaan, dengan pemberian materi singkat dan diskusi untuk memberikan kesempatan audience dalam menanggapi hal yang telah disampaikan. Dalam pendampingan penataan kelembagaan yakni aturan main yang mengatur terkait pembagian tugas dan koordinasi antar pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi atau lembaga. BUMDes Astaguna belum memiliki aturan tertulis yang mengatur norma dan kewenangan hubungan antar pengurus dan belum menjalankan pengelolaan atas dasar fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang termasuk bagian dari pembentukan unit usaha dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemasaran dan bidang administrasi. Pada bidang administrasi untuk menunjang transparansi pengelolaan kelembagaan.

Pada tahap evaluasi, menjadi tahap akhir pengabdian guna mengukur pencapaian pengabdian terhadap tujuan yang dikehendaki. Evaluasi dilakukan dalam bentuk musyawarah kepada kelompok sasaran untuk mengetahui pesan dan kesan hasil pengabdian serta diskusi mengenai pengaruh pelaksanaan pengabdian terhadap perkembangan dan kemandirian BUMDes. Dilanjutkan dengan pengisian post-

test untuk menjadi data pendukung terkait ketercapaian pelaksanaan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian mengenai pendampingan dan penguatan kelembagaan BUMDes yang menyelaraskan dengan permasalahan, maka terdapat solusi permasalahan yang dituangkan pada metode pelaksanaan, di bawah ini.

1. Sosialisasi dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan BUMDes Astaguna

Dasar dari tercapainya penguatan kelembagaan yakni dilakukan upaya pemenuhan literasi sumberdaya manusia terkait kesadaran bahwa kelembagaan menjadi bagian penting sebagai akar keberhasilan (Seru, 2019). Akan tetapi, berdasarkan dengan temuan identifikasi masalah, pengurus BUMDes Astaguna masih dikategorikan memiliki pemahaman yang rendah terkait pengelolaan kelembagaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya aturan main secara jelas dan tugas pokok fungsi pada setiap anggota, sehingga memengaruhi operasional pengelolaan yang meliputi kegiatan administrasi serta perkembangan unit usaha. Oleh karena itu, dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan guna memperbaharui hal-hal kebutuhan administrasi yang meliputi rekapiyulasi laba rugi, kajian pengelolaan usaha, rencana strategis dan rencana anggaran dasar serta anggaran rumah tangga. Pada penyusunan kebutuhan administrasi tersebut di dampingi tim pengabdian namun, pada isianannya tetap berdasarkan prakarsa pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa.

Pada penyusunan rekapitulasi laba rugi dilakukan dengan merekap laporan keuangan tahunan sesuai nota bukti pengeluaran dan pendapatan. Rekapitulasi laba rugi dilakukan untuk mengetahui dinamika perkembangan unit usaha serta sebagai tinjauan pengambilan keputusan perencanaan BUMDes selanjutnya. Kajian pengelolaan usaha diuraikan dari identifikasi pembentukan unit usaha dengan menyelaraskan potensi dan target konsumen, serta menentukan mitra. Dilanjutkan dengan memetakan rencana strategis yang selaras dengan visi dan misi dilengkapi uraian strategi, tujuan serta sasaran. Kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat seputar kelengkapan administrasi BUMDes dan peraturan pengelolaan.

Perlunya sumberdaya manusia untuk menunjang kelembagaan BUMDes dari sistem penataan administrasi, Kegiatan teradministrasi dalam BUMDes juga terdapat dalam susunan rencana kerja dan buku laporan setiap dilengkapi dokumentasi kegiatan secara baik yang dilakukan oleh sekretaris BUMDes. Perencanaan program hingga evaluasi. Hal tersebut juga berkaitan dengan pembentukan unit usaha guna mencapai operasionalisasi peran dan fungsi BUMDes. Permasalahan kelembagaan yang dihadapi oleh BUMDes Astaguna juga didapatkan dari faktor eksternal, yakni kehadiran Covid-19 disertai kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembatasan interaksi sosial atau tatap muka. Sehingga sejak kehadiran Covid-19, BUMDes Astaguna tidak aktif dan stagnan, otomatis pendapatan BUMDes juga menurun sangat signifikan.

2. Pendampingan Perencanaan Unit Usaha

Pada tahap pengabdian ini, dilakukan dengan penyusunan program kerja yang telah berjalan serta merancang penciptaan unit usaha baru dengan analisis keselarasan potensi, asset desa, dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan unit usaha baru dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi desa dan membangun inovasi dengan menyesuaikan *trend* jaman untuk menjangkau seluruh lapisan konsumen serta strategi bertahan di tengah kompetitor. Unit usaha tersebut yakni outbond rafting yang mampu menjaring daya tarik berbagai generasi, karena hakikat outbond adalah berolahraga. Untuk mengembangkan unit usaha maka, membangun jaringan mitra dengan basis ABCG (*Akademisi, Bussines, Coomunity, Government*). Untuk kerjasama dengan pihak ketiga merupakan hal yang sangat menuntungkan BUMDes khususnya dalam meningkatkan dan mempercepat penyelenggaraan, pengembangan ekonomi, pembinaan ekonomi kemasyarakatan desa dan pemberdayaan ekonomi desa.



Gambar 1. Musyawarah Penyusunan Program Kerja

Pelaksanaan pengabdian terkait perencanaan unit usaha dilangsungkan dalam bentuk musyawarah yang dihadirkan pemerintah desa, masyarakat desa, dan piha yang berkepentingan yaitu mitra. Keberhasilan sebuah unit usaha, diperlukan pemahaman permintaan konsumen dan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Masyarakat juga ikut berpartisipasi melalui musyawarah terbuka yang diselenggarakan BUMDes, dalam musyawarah, masyarakat memberikan masukan dan pendapat terhadap apa yang menjadi pembahasan saat musyawarah, dari forum tersebut dengan mudah BUMDes dapat mengetahui produksi yang sesuai dengan selera konsumen.

Perlunya optimalisasi pengelolaan unit usaha untuk menunjang produktivitas kinerja BUMDes dengan menunjukkan pengelolaan unit usaha BUMDes dengan baik dan sebagai solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Trihanggo. Peningkatan pendapatan BUMDes terjadi karena epengelolaan unit usaha dari aspek fasilitas, dan pelayanan. Sehingga, akan memberi keuntungan bagi BUMDes untuk menyumbang PADes (Pendapatan Asli Desa) melalui laba penjualan produknya. Kemudian, dalam aspek responsivitas juga memengaruhi permintaan konsumen, responsivitas tersebut berupa layanan terhadap pelanggan. BUMDes Ataguna mengupayakan perencanaan pelayanan prima terhadap pelanggan.

3. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Administrasi dan Pemasaran

Pada pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di bidang

administrasi terdapat pelaksanaan rekap laporan keuangan pada program kerja yang sudah beroperasi, diupayakan pelaporan laba dan rugi menggunakan *software excel* untuk menerapkan efisiensi serta kemudahan dalam perhitungan total pendapatan. Kemudian, tim pengabdian juga mengupayakan dokumentasi video profile BUMDes Astaguna untuk di upload pada social media, sehingga dapat dikenal oleh khalayak secara luas. Pembuatan video *company profile* BUMDes Astaguna yang meliputi sejarah, visi dan misi, serta unit usaha yang dijalankan. Pembuatan video *company profile* tersebut berada di kantor BUMDes Astaguna yang terletak di Kelurahan Trihanggo, Pasar Jambon, dan SPAMDes.

Pada pelaksanaan pelatihan terdapat kendala dari penseuaian waktu pengurus BUMDes dengan Tim Pengabdian, sehingga diupayakan penyesuaian waktu dalam jangka cukup lama. Pengembangan unit usaha yang telah berjalan juga dilakukan melalui media sosial instagram sebagai upaya strategis untuk mengembangkan usaha. Program mengembangkan toko BUMDes ke media sosial bertujuan untuk mencapai cakupan yang lebih luas.



Gambar 2. Take Video Company Profile BUMDes

Selanjutnya, tim pengabdian memberi pelatihan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemasaran melalui pembuatan akun pada *platform* instagram guna menyesuaikan era digitalisasi. Hal ini menjadi salah satu upaya eksistensi BUMDes. Di bawah ini akan ditampilkan akun instagram BUMDes Astaguna.



Gambar 3. Sosial Media untuk BUMDes Astaguna

Pada pelaksanaan pengabdian ini terdapat program internet murah sebagai penunjang kebutuhan BUMDes di masa pandemi. Hal ini termasuk upaya dalam meminimalisir populasi Covid-19. program ini untuk dimanfaatkan BUMDes dalam melakukan aktivitas produktif seperti halnya kegiatan daring. Kemudian pada pengabdian ini juga mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan *software microsoft office* di bidang administrasi. Kemudian pendampingan tersebut juga menciptakan alamat surat elektronik yakni gmail untuk menunjang efektifitas dalam kegiatan surat menyurat. Pada internet murah ini juga dinikmati oleh seluruh masyarakat desa.



Gambar 4. Tim Pengabdi Berdiskusi terkait Program Internet Murah

4. Tahap Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Evaluasi merupakan suatu proses dalam menentukan ukuran ketercapaian kegiatan dengan menggunakan patokan target tertentu

dalam rangka mencapai tujuan (Nuriyah, 2016). Dalam hal ini, terdapat ketercapaian kegiatan pengabdian yang telah tercantum pada usulan pelaksanaan pengabdian.

Tabel 2. Ketercapaian Kegiatan Pengabdian

No	Kegiatan Pengabdian	Target Capaian
1	Sosialisasi dan Pendampingan Penguatan Kelembagaan BUMDes Astaguna	Meningkatnya kualitas mutu sumberdaya manusia mengenai kelembagaan BUMDes berdasarkan dengan tugas dan kewenangan yang jelas serta
2	Pendampingan Perencanaan Unit Usaha	Tercapainya penyusunan unit usaha sesuai dengan keselarasan potensi desa dan kebutuhan masyarakat
3	Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Bidang Administrasi dan Bidang Pemasaran	Tercapainya transparansi, efektifitas, dan efisiensi di bidang administrasi. Meningkatkan permintaan konsumen melalui platform pemasaran online

Berdasarkan dengan kesesuaian pelaksanaan pengabdian Sosialisasi Kelembagaan BUMDes dan target ketercapaian pengabdian memberi hasil mendekati target. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembaharuan administrasi dengan teratur dan baik serta dilaksanakan oleh pengurus sesuai tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Akan tetapi pada temuan post-test belum menunjukkan bahwa pengurus BUMDes menguasai paparan materi yang telah disampaikan. Kemudian pada evaluasi pendampingan perencanaan unit usaha telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan mencapai target sesuai capaian, karena pada penyusunan tersebut diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat dan potensi desa, selain itu juga dalam perancangan unit usaha terdapat pelibatan masyarakat desa dan pemerintah desa.

Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan dengan metode tutorial, namun karena factor umum dan latar belakang tingkat Pendidikan pengurus rendah, sehingga tidak mengikuti perkembangan era digitalisasi menjadi kendala sesi kegiatan ini. Akibatnya beberapa pengurus mengalami kesulitan dalam mengikuti tahap tutorial.

SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pengabdian kepada pihak mitra BUMDes Astaguna diawali dengan permasalahan yang dihadapi melalui temuan data dalam tahap persiapan. Kemudian dilaksanakan pengabdian sebagai penanganan solusi melalui pelaksanaan sosialisasi sebagai tahap awal penguatan literasi mengenai pentingnya suatu kelembagaan yang ideal, dilanjutkan pendampingan penataan pengelolaan yang meliputi bidang administrasi BUMDes Astaguna dengan partisipasi aktif pengurus. Secara umum kegiatan pelaksanaan pengabdian pada binaan BUMDes telah berjalan baik dan sebagaimana perencanaan awal, khususnya pada tahap kegiatan penyusunan unit usaha yang dihadirkan masyarakat desa dan pemerintah desa. Akan tetapi terdapat kendala pada tahap pengabdian penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemasaran, yang dimana beberapa pengurus tidak mampu mengikuti langkah tutorial pelatihan. Meskipun begitu, terdapat penentuan penanggungjawab pemasaran basis online yang paling mengerti terhadap system penjualan di media social. Kedepan diharapkan pengabdian kepada masyarakat pada BUMDes Astaguna, Desa Trihanggo ini menjadi kebermanfaatn jangka Panjang dan membantu ketercapaian Lembaga yang mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, S. (2021). Efektifitas Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Panggunharjo Tahun 2018-2019 (Studi Kasus: BUMDes Panggun Lestari, Desa Panggunharjo). *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Aji, J. S. (2021). *Eksistensi BUMDes di Tengah Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Samudra biru.
- AMIRA FERDIZA, a. Y. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkat Betua Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Sakatiga Seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir. *Srwijaya University*.
- Caya, M. F. (2019). Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Journal of Social Welfare)*.
- Febryani, H. R. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Fitriska, K. (2017). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*.
- Hilman, Y. A. (2019). Strategi Bumdes Dalam Penyelenggaraan Manajemen Aset Serta Pengembangan Komoditas Kepariwisata Di Desa Ponggok, Polan Harjo, Klaten. *Tourism Scientific Journal*.
- Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Kusuma., D. &. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of Rural and Development*.
- Letty, A. &. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *urnal Penelitian Politik*.
- Nugroho, D. A. (2015). Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik

MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

- Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014–April 2015). *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* .
- Nurhayati, C. (2018). *BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa*. Pusat Penelitian, Badan Keahlian. Jakarta: DPR RI.
- Nuriyah, N. (2016). Evaluasi pembelajaran: sebuah kajian teori. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi* .
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* .
- Putri S, D. A. (2019). Sistem Kelembagaan Organisasi Subak (Studi Di Subak Babakan Bayu, Sangkaragung, Kabupaten Jembrana, Bali). *University Of Muhammadiyah Malang*.
- Seru, H. L. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Infrastruktur, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Pp No. 71 Tahun 2010 Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara. *Universitas Atmajaya Yogyakarta*.
- Suleman, A. R. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan kita menulis.
- Wirdani, A. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Di Yayasan Pendidikan Rumah Qur'an El-Tahfidz_Qu Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara. *niversitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.